Analisis Transparansi Informasi Pada Perizinan Usaha Di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka

Wahyu Hidayat^{1*}, Liza Octaviana², Reina Permata Sukma³

^{1,2} Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Institut Pahlawan 12

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Institut Pahlawan 12

Koresponding Email: : rainapermatasukma@gmail.com, wahyujulio99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi informasi dalam proses perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. Transparansi informasi merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pelayanan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara mendalam dengan pegawai dinas terkait dan pemohon izin usaha, serta analisis dokumen dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi di berbagai media, masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses informasi oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi prosedur, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas teknologi informasi, pelatihan berkala untuk pegawai, dan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pelayanan perizinan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: **Transparansi Informasi, Perizinan Usaha, Pelayanan Publik**

ABSTRACT

This research aims to analyze the transparency of information in the business licensing process at the Investment Office, One-Stop Integrated Service, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (DINPMP2KUKM) of Bangka Regency. Information transparency is a crucial aspect of enhancing public trust and the efficiency of government services. The research method used is qualitative with a descriptive analytical approach, involving in-depth interviews with relevant agency staff and business license applicants, as well as document analysis and direct observation. The results indicate that although there are efforts to improve transparency through the provision of information via various media, challenges remain such as limited public access to information, insufficient procedural socialization, and inadequate technological infrastructure. This research recommends improving information technology facilities, conducting regular training for staff, and developing more effective communication strategies to address these barriers. Thus, it is expected that business licensing services will become more transparent, accountable, and responsive to the needs of the community.

Keywords: **Information Transparency, Business Licensing, Public Service**

STUDIA ADMINISTRASI

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang berkembang pesat, terus menjadi daya tarik bagi para investor dan pelaku bisnis dari berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini mendorong kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kemudahan dalam mendirikan dan mengelola usaha. Dalam konteks ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran sangat penting. DINPMP2KUKM berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam menyediakan layanan perizinan usaha yang krusial untuk mendukung pertumbuhan sektor bisnis di tingkat lokal (Andi Iksa Fahrika dan Zulkifli, 2020).

Peran krusial DINPMP2KUKM tak hanya terletak pada pemberian izin usaha, melainkan juga pada penyediaan informasi yang jelas dan memadai kepada para pelaku bisnis. Keterbukaan informasi ini membantu mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Dengan demikian, transparansi dalam prosedur dan persyaratan perizinan menjadi landasan utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang fungsi dan efektivitas DINPMP2KUKM dalam menyediakan layanan izin usaha di tingkat daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Wenny, 2015). Melalui upaya penguatan peran dan transparansi DINPMP2KUKM, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus menjadi destinasi yang menarik bagi investor dan pelaku bisnis lokal maupun internasional. Dengan memfasilitasi proses perizinan usaha secara efisien, DINPMP2KUKM berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Wenny, 2015).

Kabupaten Bangka sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga Kabupaten Bangka berupaya untuk terus meningkatkan investasi dan pertumbuhan bisnis di wilayahnya. Dalam hal ini, ketersediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur perizinan usaha di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka menjadi sangat krusial. Kabupaten Bangka secara aktif mendorong peningkatan investasi dengan membuka peluang bagi berbagai sektor bisnis. Namun kesuksesan ini tidak hanya bergantung pada pemberian izin semata saja, tetapi juga pada peningkatan transparansi dan ketersediaan informasi yang diberika kepada para pemaku kepentingan. Namun masi terhadap kekhawatiran terkait tingkat transparansi informasi pelayanan di DINPMP2KUKM. Fokus utama kekhawatiran ini terletak pada proses perizinan usaha yang di mana kejelasan dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa para pemaku kepentingan, terutama pelaku usaha dan masyarakat umum dapat memahami dengan baik seluruh prosedur, persyaratan dan mekanisme yang terlibat dalam perolehan izin usaha di Kabupaten Bangka.

Proses perizinan usaha yang tidak transparan dapat menjadi hambatan serius bagi pelaku usaha dalam merencanakan dan menjalankan operasional bisnis mereka. kekhawatiran ini tidak hanya berdampak pada efisiensi waktu dan biaya saja, tetapi juga pada tingkat kepercayaan pelaku bisnis terhadap lembaga pemerintah setempat. Oleh karna itu, diperlukan langkah-langkah kongkret untuk meningkatkan transparansi informasi di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka sangat diperlukan, sehingga pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam proses

STUDIA ADMINISTRASI

perizinan dengan lebih yakin dan efektif. Untuk itu dilakukan studi mengenai transparansi informasi dalam pelayanan perizinan usaha di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta potensi manfaat dari peningkatan transparansi informasi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan izin usaha di Kabupaten Bangka. Penelitian ini berfokus pada "Analisis Transparansi Informasi Pada Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka" ..

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai DINPMP2KUKM, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses perizinan serta analisis dokumen yang berlaku. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketersediaan Informasi Perizinan Usaha

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa informasi mengenai prosedur perizinan usaha tersedia melalui platform online yaitu OSS (Online Single Submission). Informasi dasar seperti prosedur, persyaratan dokumen, biaya, dan waktu penyelesaian telah tersedia dan dipublikasikan melalui berbagai saluran online Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka, membagikan brosur kepada pemohon, dan papan pengumuman. Terkait ketersediaan informasi juga ditegaskan oleh masyarakat sebagai pemohon.

2. Aksesibilitas Informasi Perizinan Usaha

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa aksesibilitas informasi untuk perizinan usaha saat ini telah mengalami perbaikan signifikan dengan adanya platform Online Single Submission (OSS) yang disediakan oleh pemerintah. Melalui OSS, pemohon dapat dengan mudah mengakses informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur perizinan usaha di berbagai sektor. Penggunaan OSS juga memberikan kemudahan dalam mengajukan permohonan perizinan secara online. Untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait perizinan usaha pemerintah DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan usaha. Sosialisasi informasi tentang OSS dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk media sosial, surat kabar pemerintahan, dan acara sosialisasi yang diadakan oleh kantor pemerintah.

3. Arus Informasi Perizinan Usaha

STUDIA ADMINISTRASI

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa sistem OSS berhasil meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas arus informasi dalam proses perizinan. Pemohon merasakan manfaat dari panduan yang rinci, respons cepat, dan notifikasi yang disediakan oleh sistem. Untuk perizinan usaha tidak lagi dilakukan secara manual, tidak ada perizinan usaha yang mengeluarkan perizinan secara manual baik itu sektor perdagangan, sektor bangunan, sektor pertanian, sektor kesehatan dan lain sebagainya, semuanya telah menggunakan teknologi informasi yang artinya permohonan tidak lagi dimohonkan secara manual tetapi langsung ke dalam sistem. Yang demikian bahwa arus informasi itu sudah dilakukan, di dalam sistem itu sudah tersedia semuanya baik itu informasi, maupun persyaratan terkait dengan perizinan semuanya sudah ada.

4. Ketersediaan Akses Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa sistem OSS telah menyediakan berbagai sarana untuk membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait proses pengajuan perizinan. Di dalam sistem OSS sendiri terdapat helpdesk yang dapat dihubungi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Selain itu, DINPMP2KUKM juga menyediakan beberapa media lain untuk pengaduan, seperti kotak saran di depan kantor, media sosial, dan WhatsApp. WhatsApp dianggap sebagai saluran pengaduan yang paling efektif dan nomor kontakannya tersedia di meja front office. bahwa akses pengaduan yang tersedia sangat membantu dalam menangani kendala yang dihadapi selama proses pengajuan perizinan. Selain itu, penggunaan WhatsApp sebagai media pengaduan juga dinilai efektif dan praktis, memberikan kemudahan bagi pemohon dalam menyampaikan keluhan mereka. Dengan platform pengaduan online SP4N-LAPOR, yang memungkinkan pelacakan status pengaduan dan memberikan respon yang memadai.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa temuan penelitian terkait transparansi informasi pada izin usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM), Kabupaten Bangka secara keseluruhan sudah menunjukkan pelayanan yang baik. Pengintegrasian sistem pelayanan online membuktikan upaya dalam memberikan pelayanan perizinan yang baik kepada masyarakat. Hasil penelitian ditinjau dari beberapa aspek yaitu ketersediaan informasi, aksesibilitas informasi, arus informasi dan ketersediaan sarana pengaduan. Berikut uraian pembahasan hasil temuan penelitian dari masing-masing aspek tersebut;

Pada aspek ketersediaan informasi pada perizinan usaha di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka ditemukan bahwa informasi yang berkaitan dengan prosedur, langkah-langkah dan persyaratan sejauh ini sudah tersedia baik secara online maupun offline. Informasi mengenai prosedur perizinan usaha tersedia melalui berbagai media seperti website resmi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka. Di dalam Website mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemohon, persyaratan dokumen, serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan. Kemudian secara offline informasi tersedia pada brosur yang dibagikan langsung oleh petugas di kantor, dan papan pengumuman.

Pada aspek aksesibilitas informasi perizinan usaha di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka ditemukan bahwa bahwa aksesibilitas informasi untuk perizinan usaha saat ini telah

STUDIA ADMINISTRASI

mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya platform Online Single Submission (OSS) yang disediakan oleh pemerintah. Melalui OSS, pemohon dapat dengan mudah mengakses informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur perizinan usaha di berbagai sektor. Penggunaan OSS juga memudahkan pengajuan permohonan perizinan secara online.

Pada aspek Arus informasi di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka ditemukan bahwa kehadiran sistem OSS sudah meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas arus informasi dalam proses perizinan. Dengan sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual dimana pemohon harus langsung mengunjungi kantor dinas. Dengan demikian sistem OSS berpotensi besar dalam mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, mendukung peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Saat ini, penggunaan teknologi sangat mendorong arus informasi yang efisien dalam proses perizinan. Perizinan usaha tidak lagi dilakukan secara manual. Tidak ada lagi perizinan usaha yang dikeluarkan secara manual, baik di sektor perdagangan, sektor bangunan, sektor pertanian, sektor kesehatan, maupun sektor lainnya. Semuanya telah menggunakan teknologi informasi, yang berarti permohonan tidak lagi diajukan secara manual tetapi langsung ke dalam sistem. Arus informasi sudah terintegrasi dalam sistem, menyediakan semua informasi dan persyaratan terkait perizinan. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi keharusan dalam proses pengurusan perizinan usaha, mendukung efisiensi dan efektivitas proses perizinan. Pada aspek ketersediaan sarana pengaduan hasil penelitian menemukan bahwa DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka telah menyediakan berbagai sarana untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat. Sarana yang pertama sudah terintegrasi dengan sistem OSS, jadi didalam sistem OSS sudah tersedia menu atau layanan pengaduan seperti helpdesk. Selain itu, DINPMP2KUKM menyediakan beberapa saluran lain untuk pengaduan, seperti kotak saran di depan kantor, media sosial, dan WhatsApp. WhatsApp dianggap sebagai saluran pengaduan yang paling efektif, dan nomor kontakannya tersedia di meja front office. Untuk pengaduan online, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR. Seluruh sarana ini menunjukkan komitmen DINPMP2KUKM dalam meningkatkan transparansi dan responsivitas dalam pelayanan perizinan usaha. Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti berusaha menggali informasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi informasi perizinan usaha di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka secara keseluruhan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa aspek yang digunakan dalam mengukur transparansi informasi seperti ketersediaan informasi, aksesibilitas informasi, arus informasi dan ketersediaan sarana pengaduan masyarakat. Keempat aspek tersebut sudah dijalankan oleh DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan usaha. Namun demikian masih kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala itu timbul dari kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan prosedur atau mekanisme permohonan secara offline ke online.

STUDIA ADMINISTRASI

sehingga pelayanan perizinan masih terkesan belum maksimal. Perlunya peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi secara intens dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan". Jakarta : prenadamedia group
- Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, 2020. Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. Makasar. Yaysan Barcode.
- Dedy Mulyadi, 2016, Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung,. Alfabeta.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho (2018). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ahmad Rijali Analisis data kualitatif. UIN Antasari Banjarmasin.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Cambridge University Press.
- Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. (2006). Transparency in Historical Perspective. In H. E. Brady & D. J. Price (Eds.), Transparency in Government: How Accountability Can Be Enhanced through Better Access to Information (pp. 3–23). Routledge
- Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Thoha Miftah, 1991, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi, Widya. Mandala, Jogjakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, 2015. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

JURNAL :

- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 110–126.
- Wenny, 2015, Peran Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Membentuk Pelayaan Publik Kota Pekan Baru. Jom Fisip Volume 2 No.1- Februari 2015

ARTIKEL :

- Savas, E. (1987). Privatisation, The Key to Better Government. New Jersey:
- Chatman House Publisher